

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan usaha yang komprehensif untuk memartabatkan kehidupan bangsa sekaligus meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat maju yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu mengembangkan diri sebagai warga Indonesia yang utuh. Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum disusun sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan tingkatan pendidikan (Depdiknas, 2003).

Pendidikan memegang peranan kunci dalam pengembangan sumber daya manusia dan insan yang berkualitas. Secara kuantitas kemajuan pendidikan di Indonesia cukup menggembirakan, namun secara kualitas perkembangannya masih belum merata. Pembangunan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia telah ditetapkan melalui Masterplan Pendidikan Riau 2020, di mana sektor pendidikan telah dirumuskan 6 persoalan dasar pendidikan (Pemda Riau, 2004), yaitu: 1) Terdapatnya penduduk usia 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun yang belum tertampung di bangku sekolah serta masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan; 2) Rendahnya mutu pendidikan, kualitas lulusan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan lemahnya manajemen pengelolaan sekolah; 3) Belum relevannya pengembangan program studi pendidikan tinggi dengan potensi, investasi, dan pasar; 4) Masih adanya anak usia sekolah buta huruf, putus sekolah, dan *drop out*; 5) Rendahnya minat baca masyarakat dan terbatasnya jangkauan pelayanan perpustakaan sampai kecamatan/desa serta terbatasnya pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan; dan 6) Terbatasnya pengalaman, pemahaman nilai budaya daerah.

Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai indikator mutu pendidikan masih belum terjadi peningkatan yang berarti salah satunya hasil ujian nasional (UN) Sekolah Menengah Atas (SMA). Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti (Pemekaran Kabupaten Bengkalis) merupakan bagian dari 12 Kabupaten/Kota di Propinsi Riau. Dari perolehan UN SMA pada tahun 2009/2010 terindikasi 2-17 dari

50 kompetensi yang diujikan masih di bawah rata-rata. Perolehan kompetensi terendah di Kabupaten Bengkalis pada UN 2009/2010 sebagai berikut (BSNP,2010):

Tabel 1. Perolehan Terendah Hasil UN SMA tahun 2009/2010 Kabupaten Bengkalis Riau

Mata Pelajaran	Kompetensi yang Diujikan	Kab	Prop	Nas
B. Indonesia	Menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam kutipan cerpen	9,75	9,87	68,48
B. Inggris	Menentukan gambaran umum isi teks esei tertulis berbentuk diskusi	60,55	65,48	67,64
Matematika	Menentukan panjang proyeksi/vektor proyeksi dari suatu vektor	7,75	12,48	79,10
Fisika	Mengidentifikasi manfaat radioisotop dalam kehidupan dan jenis-jenis zat radioaktif	6,07	5,88	38,69
Kimia	Menentukan nama proses pengolahan untuk memperoleh unsur tertentu	1,50	12,66	58,24
Biologi	Menginterpretasikan kasus/pembuktian asal usul kehidupan	22,5	24,72	40,52
Ekonomi	Menyelesaikan kasus koperasi sekolah	3,14	3,19	60,07
Geografi	Mengidentifikasi prinsip geosfer dalam kehidupan sehari-hari	0,76	8,90	51,94
Sosiologi	Menjelaskan dampak negatif dari liberalisme/sekularisme/westernisasi	1,87	2,54	68,68

Rendahnya perolehan tersebut perlu dicari solusinya secara bersama-sama. Semua pihak perlu turut bertanggung jawab secara moral apa yang harus dilakukan, dan terobosan apa yang harus dijalankan, sehingga secepatnya dapat terjadi peningkatan mutu pendidikan. Peran LPTK sangat menentukan terhadap kualitas pendidikan, karena LPTK merupakan lembaga penghasil tenaga guru. Selain LPTK, masih banyak pihak yang terlibat dalam mewujudkan pendidikan bermutu, di antaranya dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, LPMP, MGMP, KKG, K3S, dan lainnya. Sinergi semua pihak diperlukan untuk memecahkan masalah ini.

Berdasarkan hal-hal di atas sesuai dengan kebijakan pemerintah dan penyediaan dana penelitian melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional maka akan

dilaksanakan penelitian **Pemetaan dan Model Pengembangan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti Propinsi Riau.**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana profil kompetensi siswa SMA di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti pada setiap kompetensi yang diujikan pada Ujian Nasional?
- 2) Apa yang menjadi faktor penyebab rendahnya kompetensi peserta didik pada kompetensi tertentu ?
- 3) Bagaimana merancang, mengembangkan model pemecahan masalah yang valid dan siap diimplementasikan secara konkret.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan agregasi penelitian pemetaan dan pengembangan mutu pendidikan SMA di Provinsi Riau sebagai berikut:

- 1) Membuat peta kompetensi siswa SMA pada setiap pokok bahasan mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional
- 2) Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab peserta didik belum menguasai standar kompetensi/ kompetensi dasar
- 3) Merancang, mengembangkan model pemecahan masalah yang valid dan siap diimplementasikan secara konkrit di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti.

1.4. Luaran /Manfaat Penelitian

Penelitian Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti Provinsi Riau diharapkan menghasilkan luaran sebagai berikut.

- 1) Data tentang standar kompetensi/kompetensi dasar yang belum dikuasai peserta didik dan faktorsetiap mata pelajaran SMA yang diuji secara nasional (Ujian Nasional) dapat dijadikan dasar untuk membuat peta kompetensi.
- 2) Data tentang Faktor-faktor penyebab peserta didik belum menguasai standar kompetensi/kompetensi dasar pada mata pelajaran SMA yang diuji secara

nasional (Ujian Nasional) dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan model pemecahan masalah.

- 3) Alternatif dan model pemecahan masalah yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pihak terkait terutama dinas pendidikan kabupaten/kota, LPMP, MGMP, KKG, dan K3S.

BAB II

STUDI PUSTAKA

Ujian Nasional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka memacu peningkatan mutu pendidikan. Ujian Nasional selain berfungsi untuk mengukur dan menilai pencapaian kompetensi lulusan dalam mata pelajaran tertentu, serta pemetaan mutu pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, juga berfungsi sebagai motivator bagi pihak-pihak terkait untuk bekerja lebih baik guna mencapai hasil ujian yang baik. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Ujian Nasional, siswa terdorong untuk belajar lebih baik dan guru terdorong untuk mengajar lebih baik pula.

2.1. Ujian Nasional (UN)

2.1.1 Sejarah Ujian Nasional (UN)

Kemendiknas (2011) menyatakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sistem ujian nasional telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan, perkembangan ujian nasional tersebut, yaitu:

- Periode 1965-1971

Pada periode ini, sistem ujian akhir yang diterapkan disebut dengan Ujian Negara, berlaku untuk hampir semua mata pelajaran. Bahkan ujian dan pelaksanaannya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan seragam untuk seluruh wilayah di Indonesia.

- Periode 1972-1979

Pada tahun 1972 diterapkan sistem Ujian Sekolah di mana setiap atau sekelompok sekolah menyelenggarakan ujian akhir masing-masing. Soal dan pemrosesan hasil ujian semuanya ditentukan oleh masing-masing sekolah/ kelompok sekolah. Pemerintah pusat hanya menyusun dan mengeluarkan pedoman yang bersifat umum.

- Periode 1980-2000

Untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu pendidikan serta diperolehnya nilai yang memiliki makna yang sama dan dapat dibandingkan antar sekolah, maka sejak tahun 1980 dilaksanakan ujian akhir nasional yang dikenal dengan sebutan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). Dalam EBTANAS dikembangkan sejumlah perangkat soal yang paralel untuk setiap mata pelajaran, dan penggandaan soal dilakukan di daerah.

- Periode 2001-2004

Sejak tahun 2001, EBTANAS diganti dengan penilaian hasil belajar secara nasional dan kemudian berubah nama menjadi Ujian Akhir Nasional (UAN) sejak tahun 2002. Perbedaan yang menonjol antara UAN dengan EBTANAS adalah dalam cara menentukan kelulusan siswa, terutama sejak tahun 2003. Dalam EBTANAS, kelulusan siswa ditentukan oleh kombinasi nilai semester I (P), nilai semester II (Q), dan nilai EBTANAS murni (R), sedangkan kelulusan siswa pada UAN ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual.

- Periode 2005-sekarang

Untuk mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan yang bermutu, pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) untuk SMP/MTs/SMPLB dan SMA/SMK/MA/SMALB/SMKLB.

- Periode 2008 - sekarang

Untuk mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan yang bermutu, mulai tahun ajaran 2008/2009 pemerintah menyelenggarakan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk SD/MI/SDLB.

2.1.2 Pengertian Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional (UN) diselenggarakan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan kepada Badan Standar Pendidikan (BSNP) (Subagiyo, 2008).

Untuk pelaksanaan UN tersebut, Menteri Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 45 tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta didik SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011. Dan Permendiknas Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian nasional pada SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011 (BSNP, 2011).

Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ujian Nasional merupakan salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mencetak peserta didik yang berkualitas dalam bidang akademik (anonimous^c, 2011)

Menurut Pujiharti (2007), Ujian Nasional merupakan salah satu instrument dalam evaluasi pendidikan dalam skala nasional. Tujuan dari ujian nasional harus jelas, serta tidak boleh terlepas dari proses pendidikan secara keseluruhan.

BSNP (2011) menyatakan bahwa Ujian Nasional (UN) adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Adapun tujuan dari UN adalah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.1.3 Fungsi dan manfaat Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka memacu peningkatan mutu pendidikan. Ujian Nasional selain berfungsi untuk mengukur dan menilai pencapaian kompetensi lulusan dalam mata pelajaran tertentu, serta pemetaan mutu pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, juga berfungsi sebagai motivator bagi pihak-pihak terkait untuk bekerja lebih baik guna mencapai hasil ujian yang baik.

Hasil UN dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

1. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
3. Penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan
4. Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan (BSNP, 2011).

2.2. Standar Nasional Pendidikan

Dalam Peraturan Pemerintah 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB II pasal 2 disebutkan bahwa Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a) Standar isi; (b) Standar proses; (c) Standar kompetensi lulusan; (d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) Standar sarana dan prasarana; (f) Standar

pengelolaan; (g) Standar pembiayaan; dan (h) Standar penilaian pendidikan. Penjabaran dari kedelapan standar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Standar isi adalah cakupan materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- b. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- c. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah bagian dari standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria kompetensi lulusan minimal yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan SKL kita akan memiliki patok mutu (*bench-mark*) baik bersifat evaluasi mikro seperti kualitas proses dan kualitas produk maupun bersifat evaluasi makro seperti keefektifan dan efisiensi suatu program pendidikan, sehingga ke depan pendidikan kita akan melahirkan standar mutu yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- e. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimum tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- g. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

h. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

2.3. Pemetaan Kompetensi

Kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu (Majid, 2008).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Standar Isi (SI) mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam SI adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK), dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis serta jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar Kompetensi Lulusan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (BSNP *dalam* Supinah, 2008). Berdasarkan KTSP, mata pelajaran IPA di SMP terdiri dari 18 SK dan 72 KD (lampiran 1) yang harus dikuasai oleh setiap siswa.

Berdasarkan BSNP (2011), untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh mengenai semua standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran maka dilakukanlah pemetaan kompetensi dasar. Karena berisi gambaran secara keseluruhan kompetensi, maka peta kompetensi ini dapat dijadikan acuan bagi sekolah dalam rangka memperbaiki pembelajaran dan mutu pendidikan.

Pemetaan kompetensi ini biasa digambarkan dengan menggunakan diagram tulang ikan (*fish bone*). Diagram ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli manajemen berkebangsaan Jepang yang bekerja di perusahaan Kawasaki bernama Kaoru Ishikawa pada sekitar awal tahun 1960. Oleh karena diagram ini berbentuk seperti tulang ikan, maka sering disebut juga diagram tulang ikan. Diagram ini sering di gunakan untuk mengungkapkan semua kemungkinan faktor yang menjadi penyebab suatu masalah, maka dinamakan diagram sebab-akibat.

Guru berperan penting untuk dapat menciptakan situasi KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), guru sebagai pengarah dan pembimbing harus mampu mengelola proses

pembelajaran dan mampu menciptakan sistem pembelajaran yang efektif maka kualitas proses belajar akan tercapai. Tetapi jika guru masih terpaku pada paradigma lama dimana hanya memandang keberhasilan proses belajar mengajar ditentukan nilai akhir saja maka kualitas pembelajaran tidak akan mencapai kemajuan (Depdiknas, 2002).

Kementerian Pendidikan Nasional telah menetapkan formula baru UN 2011 melalui Permendiknas Nomor 45 tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik SMP/ MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/ 2011. Pedoman Pelaksanaan Ujian Sekolah/ Madrasah dan Ujian Nasional pada SMP/ MTs, SMPLB, SMA/ MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/ 2011; dan Operasional Standarnya diatur pada Peraturan BSNP Nomor: 0148/ SK-POS/BNSP/1/2011 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian nasional pada SMP/ MTs, SMPLB, SMA/ MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/ 2011.

Analisa komparatif regulasi UN 2011 dengan regulasi UN 2010 dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan pokok UN 2010 dan UN 2011

No	KOMPONEN	PERBEDAAN	
		UN 2010	UN 2011
1	Formula kelulusan Mapel UN Mapel US/ M	Nilai UN 100% Nilai US/ M 100%	NA= 60% nilai UN + 40% Nilai S/M Nilai S/M = 40% Rata- Rata Raport + 60% Nilai US/M
2	Soal Ujian	Dua Paket Terpola	Lima Paket Acak

Penelitian ini mengacu pada kerangka dasar upaya peningkatan mutu pendidikan seperti tertera pada Gambar 1. Diharapkan hasil penelitian dapat memotret berbagai faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pendidikan di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti Provinsi Riau sebagai wilayah yang diteliti terutama sistem manajemen, guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan budaya masyarakat.

Sedangkan tujuan pelaksanaan "Perencanaan Penyusunan Analisa Standar Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Bengkalis" adalah: 1) Untuk mengetahui dan mengevaluasi kondisi standar pelayanan pendidikan yang sudah diterapkan di Kabupaten Bengkalis; 2) Untuk mengidentifikasi lebih awal permasalahan pelaksanaan

standar pelayanan minimal pendidikan di Kabupaten Bengkalis; 3) Untuk mengetahui dan mengevaluasi program pendidikan penunjang dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Bengkalis; 4) Untuk membuat suatu perencanaan dan pengembangan standar pelayanan minimum pendidikan di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti.

Kesimpulan dari kajian ini adalah: 1) Perencanaan Analisis SPM Bidang Pendidikan ini hanyalah gambaran dari suatu evaluasi program pembangunan pendidikan khususnya pada satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dengan menggunakan indikator standar pelayanan minimum menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004. Perencanaan Analisis SPM Bidang Pendidikan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi para pengelola pendidikan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkalis, baik pengelola pada tingkat satuan pendidikan, maupun pengelola pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Namun sebaliknya, Perencanaan Analisis SPM Bidang Pendidikan ini akan menjadi sebuah dokumen yang tidak akan memberikan makna apa-apa, jika tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya; 2) Agenda, Kebijakan, dan program pencapaian standar pelayanan minimum Bidang Pendidikan khususnya pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK sebagaimana diuraikan di muka, merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Riau, dan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Namun demikian, bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis, tidak terlalu mempersoalkan bidang garapan yang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yang paling penting ialah seluruh bidang garapan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.

Berkaitan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan, dalam pengembangan mutu pendidikan di Provinsi Riau maka penelitian pemetaan dan pengembangan Mutu Pendidikan di Provinsi Riau merupakan peta jalan penelitian yang

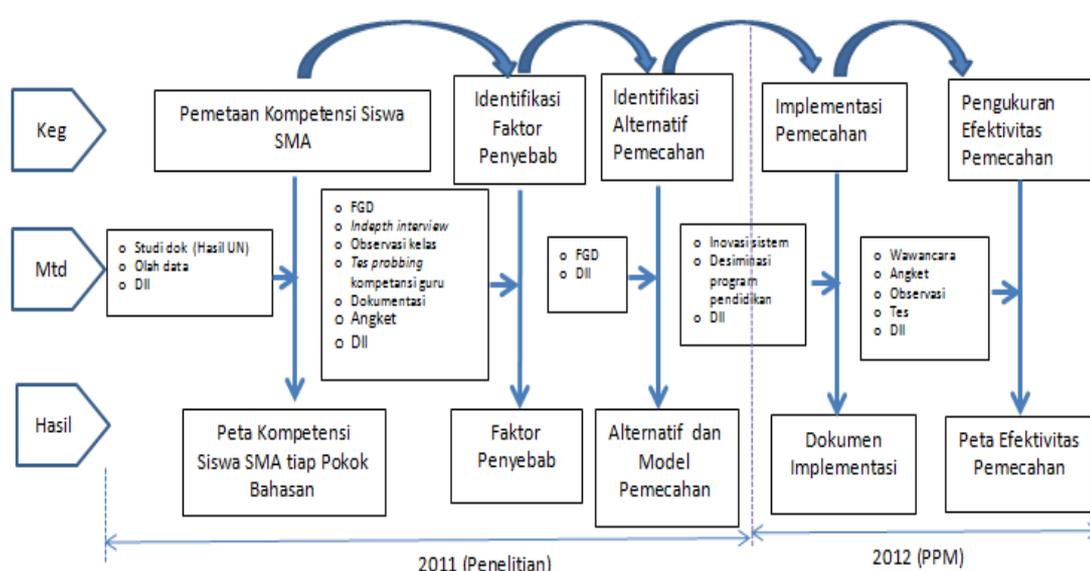
dilakukan oleh tim peneliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini rencananya akan diarahkan untuk memotret berbagai faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pendidikan di Provinsi Riau sebagai wilayah yang diteliti terutama sistem manajemen, guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan budaya masyarakat. Di samping itu, penelitian ini diharapkan menghasilkan model pemecahan masalah pendidikan di Provinsi Riau yang siap diimplementasikan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan benar-benar fungsional, komprehensif, dan aplikatif yang relevan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

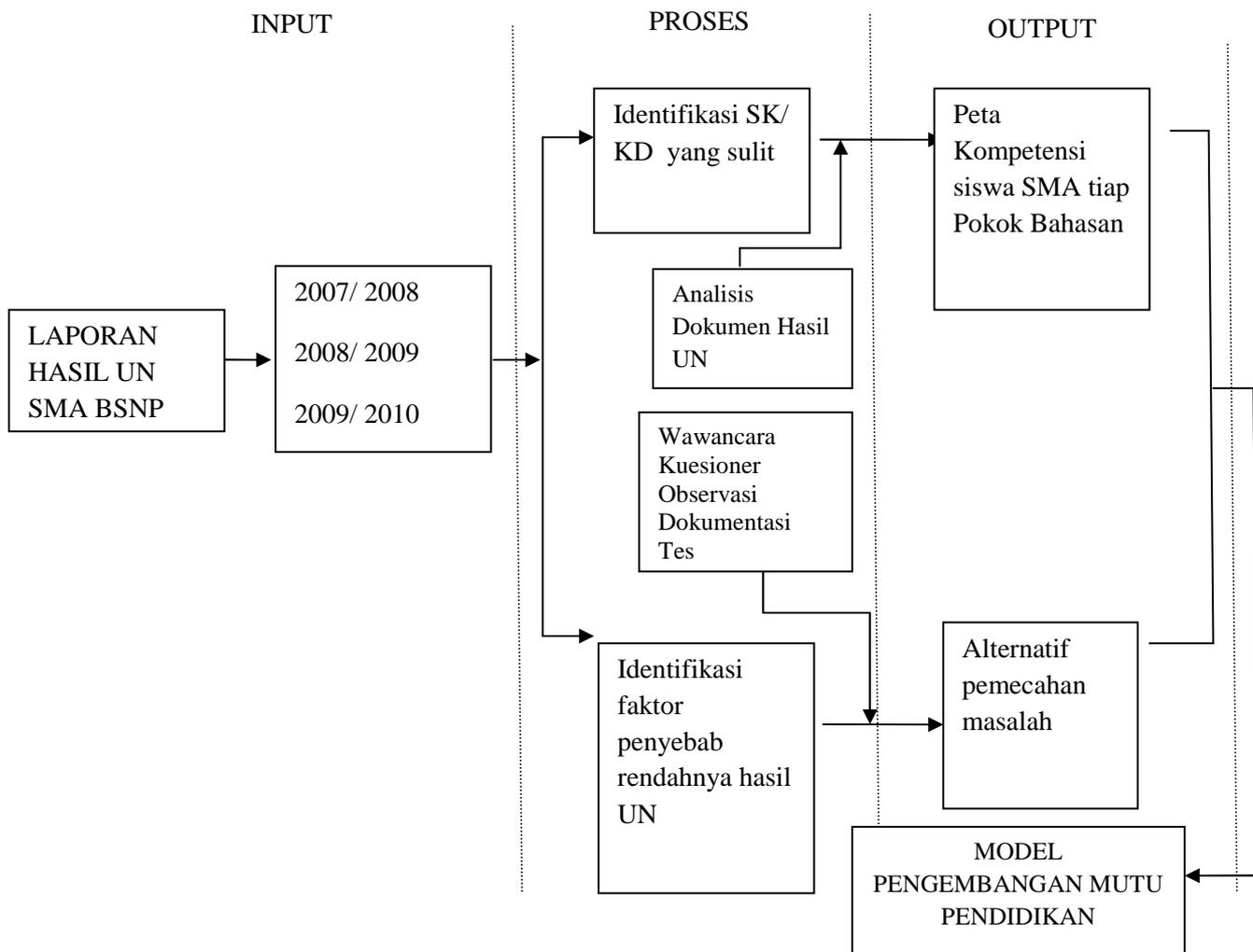
3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode deskriptif (*Descriptive Research*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Penelitian ini mengacu pada kerangka dasar upaya peningkatan mutu pendidikan seperti tertera pada Gambar 1. Diharapkan hasil penelitian dapat memotret berbagai faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pendidikan di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti Provinsi Riau sebagai wilayah yang diteliti terutama sistem manajemen, guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan budaya masyarakat.



Penelitian ini bertumpu pada latar belakang masalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai kompetensi siswa SMA kab Bengkalis dan Meranti pada mata pelajaran yang diujikan UN serta mengetahui faktor penyebab rendahnya hasil yang diperoleh pada kompetensi tertentu. Kerangka dan bagan alir penelitian seperti pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Kerangka Penelitian

3.2. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini adalah subyek darimana data dapat diperoleh berupa:

- 1) *Person*, sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui kuesioner, untuk selanjutnya disebut **responden**. Responden pada penelitian ini adalah Kepala sekolah, guru mata pelajaran, siswa SMA dan masyarakat. Jenis data: primer
- 2) *Place*, sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam (ruangan belajar, kelengkapan alat dan lain-lain) dan bergerak (proses belajar mengajar) yang merupakan objek untuk observasi. Jenis data: primer

- 3) *Paper*, sumber data yang berupa huruf, angka, gambar atau simbol yang merupakan data yang diperoleh melalui dokumentasi. Jenis data: sekunder

3.3. Sampel Penelitian

Jumlah SMA Negeri dan Swasta di Kab. Bengkalis 58 sekolah dan Kab. Kepulauan Meranti 27 Sekolah. Selanjutnya dalam penelitian ini sekolah dikelompokkan berdasarkan wilayah yaitu Wilayah 1 (SMAN di Ibu kota kabupaten yaitu SMAN 1 Bengkalis) , wilayah 2 (SMAN diibukota kabupaten pemekaran yaitu SMAN 1 Tebing Tinggi) dan wilayah 3 (SMAN di wilayah sulit/terpencil iaitu SMAN Rangsang)

3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Data primer dikumpulkan melalui wawancara , observasi dan kuesioner. Data sekunder melalui dokumentasi.

- 1) Wawancara dilaksanakan secara terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang memuat hal yang menjadi fokus wawancara. Objek wawancara: kepala Dinas pendidikan Kab/kec, pengawas, kepala sekolah, wakasek kurikulum, sarana dan prasarana, staf administrasi/lab, guru, siswa dan tokoh masyarakat.
- 2) Observasi dilaksanakan untuk mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran menggunakan lembar observasi.
- 3) Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi dari guru menggunakan angket tertutup dan terbuka.

3.5. Analisis Data

Analisis data sekunder dari Pusat Penilaian Pendidikan BSNP yang tersedia dalam bentuk Microsof Acces. Selanjutnya data tersebut dikonversi menggunakan program CONVERTER ABBY. Data primer hasil wawancara, kuesioner dan observasi dilakukan analisis deskriptif untuk menyederhanakan dan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan data dari langkah klasifikasi dan kategorisasi sehingga dapat tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk persentase, tabel, dan grafik dan gambar. Proses kategorisasi dan klasifikasi data kualitatif dilakukan secara bertahap atas jawaban-jawaban responden dan hasil

identifikasi dianalisis menggunakan Diagram Tulang Ikan (*Fishbone Diagram*) yang dilanjutkan dengan interpretasi. Pembahasan dilaksanakan dengan mempergunakan metode komparatif.